

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan adalah program nasional di bidang kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui inovasi kegiatan SAMBAL LALAP, PERNIK DASI SMA, SIKADO dan SI IKAN MAS sehingga terciptanya tujuan dari program ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan mengerti pentingnya rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan, serta membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menerapkan manajemen Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan secara menyeluruh, berdasarkan konsep William H. Newman. Hal ini meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber daya, pengendalian kerja, dan pengawasan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah dan kekurangan.

Pada perencanaan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Padang dilakukan secara matang dan sesuai dengan tujuan program, dengan penetapan tujuan yang jelas, keterlibatan aktor yang terdefinisi, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perencanaan Sumber daya manusia dan aktor pelaksana kegiatan juga terstruktur.

Pengorganisasian Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Padang dilakukan dengan cermat dan sistematis. Kepala Dinas berperan penting dalam mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan tujuan program, mendelegasikan tugas kepada kepala bidang dan anggota pelaksana kegiatan, serta memastikan koordinasi yang efektif antar pihak. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan jemput bola merupakan contoh nyata dari pengorganisasian yang baik. Tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak telah ditetapkan dengan jelas, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada variabel Pengumpulan sumber daya terdapat beberapa kekurangan untuk Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Padang. Kekurangan ini meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Kurangnya sumber daya manusia terlihat dari minimnya tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan jemput bola yang mana dilakukan langsung di lapangan yang mana banyaknya masyarakat yang melakukan pelayanan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang. Hal ini dapat menyebabkan program berjalan lamban. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan bus UP3K tidak dapat dioperasikan karena dana perawatannya tidak mencukupi.

Pengendalian kerja pada Program gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Padang dilakukan dengan baik. Upaya pengendalian seperti pelatihan dan pembinaan pegawai telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini

berdampak positif pada peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan kegiatan-kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dilakukan oleh Kepala Dinas dengan dua cara, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mengunjungi lokasi kegiatan di lapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan meninjau laporan-laporan yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah menetapkan sistem manajemen yang efektif, dimulai dari tahap perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, pengumpulan sumber daya yang memadai, pengendalian kerja yang ketat, dan pengawasan yang menyeluruh. Penerapan sistem manajemen ini telah menghasilkan kinerja yang optimal dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Manajemen Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Padang perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran dalam APBD untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pengembangan dan

pengelolaan sarana dan prasarana, peralatan, dan perlengkapan yang lebih memadai. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Padang dapat meningkat secara signifikan.

- 2) Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat melakukan penambahan sumber daya manusia yang dirasa masih kurang demi lancarnya pelaksanaan kegiatan di kantor maupun turun langsung ke lapangan melayani masyarakat.
- 3) Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan informasi yang ada pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang adalah Info Layanan. Sehingga masyarakat mudah mengetahui terkait info layanan yang sedang berjalan maupun jika layanan terjadi kendala.
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang diharapkan dapat lebih informatif terhadap layanan-layanan yang diberikan baik itu ada kendala maupun tidak tetap diinfokan di sosial media maupun di situs webiste, serta lebih responsif terhadap pengaduan masyarakat melalui hotline yang telah diberikan.

